



PENILAIAN RISIKO BISNIS DAN HAM DUKUNG PENINGKATAN RATING ESG PERTAMINA

*BUSINESS RISK AND HUMAN RIGHTS
ASSESSMENT SUPPORTS PERTAMINA
ESG RATING IMPROVEMENT*

Entitas bisnis yang bergerak di bidang energi memiliki risiko yang tinggi dan kompleks serta melibatkan banyak orang dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk itu, penegakan atas hak asasi manusia (HAM) menjadi sebuah komitmen yang krusial bagi keberlangsungan perusahaan, termasuk Pertamina.

Menyadari hal itu, Pertamina menjadi BUMN pertama yang menjalankan Human Rights Due Dilligence dengan menggunakan alat ukur Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan berhasil menyelesaikan penilaian tersebut dengan hasil yang sangat memuaskan.

"Alhamdulillah di tahun 2022, Pertamina beserta seluruh Subholding dan beberapa anak perusahaan di Pertamina Group berhasil menyelesaikan penilaian PRISMA," ujar Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto pada Jumat, 27 Januari 2023 di Ballroom I

Business entity in energy sector has high and complex risk which involves a lot of people on the business processes. Therefore, the enforcement for the human rights has been the crucial commitment for the company sustainability, including Pertamina.

Hence, Pertamina is the first state-owned enterprises to carried out the Human Rights Due Diligence with the measure of Business Risk and Human Rights Assessment (PRISMA) as developed by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and had a satisfying result.

"Alhamdulillah in 2022, Pertamina with all the Subholdings and several subsidiary entities at Pertamina Group has finished PRISMA assessment," said the Pertamina Director of Human Rights, M. Erry Sugiharto on Friday, 27 January 2023 at Ballroom I Marriott



Pertamina bersama 6 subholding dan 2 anak perusahaan mendapatkan sertifikat PRISMA dari Kementerian Hukum dan HAM.
Pertamina along with 6 subholdings and 2 subsidiaries received PRISMA certificates from the Ministry of Law and Human Rights.refinery area.

Hotel Marriot Harbour Bay, Batam.

Erry juga mengatakan bahwa prinsip bisnis dan HAM menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. "PRISMA sangat efektif dalam mendukung pencapaian nilai rating ESG yang pada tahun 2022 mencapai peningkatan penilaian yang signifikan, salah satunya disumbangkan dari implementasi pengelolaan HAM di Pertamina. Hal ini juga mendorong peningkatan kepercayaan investor pada berbagai perusahaan di Pertamina Group," kata Erry menambahkan.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa pengelolaan HAM di Pertamina juga diwujudkan melalui beberapa program, seperti Respectful Workplace dalam rangka mencegah terjadinya diskriminasi dan pelecehan di lingkungan kerja perusahaan.

"Kami juga mengembangkan alat audit Pertamina Industrial Peace Level (PIPL) untuk menjamin keberlanjutan dan keselarasan pengelolaan industrial peace sehingga Perwira Pertamina merasa

Hotel Harbor Bay, Batam.

Erry said the business and human rights principles have been an integral part in Pertamina. "PRISMA has been very effective on supporting the achievement of ESG rating assessment in 2022 with significant result, including from the implementation of human rights management in Pertamina. This has encouraged the trust from investors towards the companies within Pertamina Group," Erry added.

Additionally, he said the human rights management in Pertamina is also realized through several programs, including the Respectful Workplace to prevent the discrimination and abuse at the workplace.

"We also developed the auditing tool of Pertamina Industrial Peace Level to ensure the sustainability and synchronise of industrial peace management for Pertamina officers to

nyaman dan secure selama bekerja," terang Erry.

Direktur Jendral Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Muallimin Abdi mengatakan, secara natural Pertamina telah melaksanakan Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam menjalankan bisnisnya.

"Kami tinggal memolesnya sedikit kepada hal-hal yang belum lengkap, setelahnya Pertamina group masuk ke dalam kualifikasi perusahaan yang telah menjalankan aktivitas bisnisnya di dalam HAM," ujar Muallimin.

Muallimin menyampaikan bahwa isu tentang bisnis dan HAM menjadi perbincangan terhangat saat ini di dunia. Oleh karena itu, sertifikasi PRISMA menjadi sesuatu yang sangat penting karena Pertamina saat ini sudah mulai Go Global.

"Melalui penerapan prinsip bisnis dan HAM, Pertamina menjadi korporasi yang ramah terhadap nilai-nilai HAM di dunia internasional. Ini menjadi sesuatu hal yang diperlukan di dalam aktivitas bisnis, karena ke depan bisnis tidak hanya yang terkait dengan mutu, ketepatan, dan profit semata, melainkan juga sampai sejauh mana entitas bisnis itu telah menerapkan nilai-nilai HAM," tambahnya.

Keberhasilan Pertamina Group dalam memperoleh Sertifikat PRISMA juga disambut baik oleh Muallimin. "Saya mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menegakkan nilai-nilai HAM di dalam perusahaan, tentunya ini akan membawa kebaikan di masa yang akan datang, khususnya di dunia internasional. Semoga keberhasilan Pertamina dapat diikuti oleh BUMN lain, pasalnya Sertifikat PRISMA ini nantinya akan menjadi sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan di Indonesia," pungkash Muallimin. ■

feel secure during work," said Erry.

General Director of Human Rights at the Ministry of Law and Human Rights, Muallimin Abdi said, Pertamina has carried out the business and human principles on their business by nature.

"We should only improve a bit for an incomplete matter, afterward, Pertamina Group would be qualified to be the company that has carried out the business activities within human rights principles," said Muallimin.

Muallimin said, the issue on business and human rights is the recent discourse in the world. Therefore, the PRISMA certification is something important as Pertamina is currently underway for being Go Global.

"Through the implementation of business and human rights principles, Pertamina has become a company that aware of the importance of human rights values at the global level. This is necessary for business activities since everything business related would not only implicate with the quality, accuracy, and profitability, but also on how the business entity to implement the human rights values," he added.

The success of Pertamina Group to obtain PRISMA certificate was also welcomed by the Muallimin. "I appreciated the hard work of Pertamina on enforcing the human rights values in the company which will bring improvement in the future, especially in the global level. We expect this success to be followed by other state-owned enterprises since PRISMA Certificate would be an obligatory for every company in Indonesia," said Muallimin. ■

PENERIMA SERTIFIKAT PRISMA DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1

PT PERTAMINA (PERSERO)

2

SUBHOLDING UPSTREAM

3

SUBHOLDING GAS

4

SUBHOLDING PNRE

5

SUBHOLDING REFINING & PETROCHEMICAL

6

SUBHOLDING COMMERCIAL & TRADING

7

SUBHOLDING INTEGRATED MARINE & LOGISTICS

8

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

9

PT PERTAMINA RETAIL